

MEMBANGUN PARADIGMA AKUNTASI SYARIAH

Oleh: Agus Arwani, SE, M.Ag.

Penulis adalah Dosen STAIN Pekalongan

ABSTRACT

Although the history of accounting stretches back to when the first organised society began, accounting theory development is mainly a child of the 20th Century. Although the profession began in the UK in 1853 in Scotland, it is in the USA accounting theory development took place with the contribution of academics and the participation of the profession. The accountability framework is discussed and proposed as an alternate framework. The reasons why this framework would be the most likely to be the one adopted in any Islamic accounting are given. The philosophy, ontology and epistemology of the Islamic worldview are given as a background to the need for of Islamic accounting. These are then discussed in the light of objectives of the Islamic syariah on which Islamic accounting would have to be based. The objectives of Islamic accounting are then discussed with the implication for Islamic accounting concepts, principles and reporting practices. It is concluded that Islamic accounting is part of the evolution of accountancy to a more holistic approach that takes into account the socio/political/natural environments and as an attempt to liberate accounting from its incarceration in the utilitarian economic domain.

Keyword: Islamic Accounting

وعلى الرغم من تاريخها المحاسبة تعود إلى المجتمع عندما بدأ أول تنظيم ، والمحاسبة التنمية النظرية أساسا طفل في القرن 20 . أخذت على الرغم من أن مهنة بدأت في المملكة المتحدة في عام 1853 في اسكتلندا ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية في نظرية التنمية المحاسبة مكان بمساهمة من الأكاديميين ومشاركة هذه المهنة . وتناقش إطار المساءلة الإعلانية المقترحة كإطار بديل . أسباب لماذا هذا الإطار يكون من الأرجح أن تكون تلك التي تم اعتمادها في أي المحاسبة الإسلامية وترد . وترد الفلسفة ، وعلم الوجود ونظرية المعرفة من النظرة الإسلامية كخلفية لضرورة المحاسبة الإسلامية . وتناقش هذه ثم في ضوء أهداف الشريعة الإسلامية التي المحاسبة الإسلامية يجب أن يكون بناء . ثم ناقش هي أهداف المحاسبة الإسلامية مع التلميح لمفاهيم المحاسبة الإسلامية ، مبادئ وممارسات تقديم التقارير . نستخلص من ذلك أن المحاسبة الإسلامية هو جزء من تطور المحاسبة إلى نهج أكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية / السياسية / البيئات الطبيعية ومحاوله لتحرير المحاسبة من السجن في المجال الاقتصادي النفعية.

A. Pendahuluan

Wacana ekonomi syari'ah terus bergulir dalam konteks kehidupan global. Pada awalnya wacana tersebut muncul dengan malu-malu dan disambut dingin oleh sebagian ahli bahkan tidak sedikit yang mempersoalkan landasan epistemologi dan ontologinya. Sekarang wacana tersebut telah menampakkan geliat yang luar biasa dan telah menjadi wacana publik. Ini dapat dilihat dari élan wacana ekonomi syari'ah yang tidak saja berhenti pada persoalan riba dan bunga bank, akan tetapi memasuki wacana ekonomi syari'ah yang lebih luas. Seperti tentang penciptaan sistem ekonomi yang adil, sistem akuntansi dan manajemen dari kegiatan ekonomi dan sebagainya.

Dalam konteks global, pakar di bidang akuntansi syari'ah boleh dibilang masih sangat sedikit untuk tidak mengatakan tidak ada. Dan untuk konteks Indonesia, para pakar akuntansi yang sangat konsern terhadap perkembangan sistem keuangan syari'ah. Salah satu dari sekian banyak karya pakar yang berbicara tentang persoalan akuntansi syari'ah. Dengan penerbitan karyanya tersebut, paling tidak telah membuka wacana baru dalam bidang keuangan Islam. Dan karya tersebut kalau diibaratkan sebagai *oase* di tengah padang pasir luas Ilmu Ekonomi konvensional umumnya dan studi-studi keislaman khususnya.

B. Kritik Akuntansi Konvensional dan Akuntabilitas

Penelitian akuntansi dengan pardigma positivist dan pedekatan reductionist decision-usefulness yang telah menjadi kritikan yang keras oleh di antara nya oleh Laughlin& Puxty (Laughlin, & Puxty, 1981: 43-87), Chua (Chua, W.F., 1986), Cooper & Sherer (David J. and Michael J., 1984: 207-232), Tinker et al (Merino and M.Neimark, 1982: 167-200), dan Gray et al (Gray, and C. Adams, 1996) untuk membangun suatu kenyataan sosial yang mana mengakibatkan suatu ketidakadilan, eksploitasi dunia. Penambahan tujuan kesejahteraan sosial yang dinyatakan dalam AAA tahun 1975 terus meningkat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang diterima sebagai '*kebenaran yang diungkapkan*' dengan tendensi peneliti dan profesi akuntansi yang telah keras mengkritisi seperti Gray et al dan Laughlin& Puxty

"... Kesejahteraan sosial tidak bisa tertarik pada usulan bahwa jika kebutuhan pemakai (yaitu informasi yang memaksimalkan kekayaan berkaitan dengan harga (saham) yang dicukupi, kesejahteraan lebih besar akan menghasilkan, oleh karena operasi dalil dari Lipsey-Lancaster (Laughlin, & Puxty, 1981: 43-87).

Awal kabar tidak baik dunia (yaitu kemiskinan tersebar luas, penurunan (derajad) lingkungan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak adil dan lain-lain) apakah itu berhubungan dengan berita gembira (standard tinggi tinggal di barat dan negara-negara industri baru saja, jangka hidup lebih panjang, pengembangan dan globalisasi teknologi komunikasi dan komputer) dan akuntansi konvensional berdasar

pada *decision-usefulness*, fungsi paradigma yang bertanggung jawab untuk menciptakan kenyataan sosial ini dan melanjut untuk memotivasi perilaku ke arah *self-destruction* telah mengakibatkan "kebutuhan untuk menggantikan kebutuhan pemakai semakin mendekati dengan konsep pokok akuntansi" (1991, 1996) (Gray and K. Maunders, 1991: 1-21).

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kerangka teoritis yang mengusulkan penetapan sosial (perusahaan) yang melaporkan sebagai usaha sah. konon Untuk meningkatkan transparansi demokrasi dan organisasi dalam masyarakat (Gray and K. Maunders, 1991: 1-21).

Akuntabilitas sebagai:

"Tugas menyediakan suatu akuntansi (sama sekali tidak perlu akuntansi keuangan) atau memperhitungkan semua tindakan itu berakuntansi" (Gray and K. Maunders, 1991: 38).

Definisi di atas menekankan pelepasan (pemecatan) tanggung-jawab dibandingkan tanggung-jawab diri sendiri. Masalah kedua, definisi apakah itu bukanlah mudah untuk menggambarkan apa tindakan penanggung jawab adalah bertanggung jawab kepada akunting itu. Dari perspektif masyarakat barat, para direktur sebagai contoh tidak akan bertanggung jawab untuk pribadi mereka hidup kepada akunting. Tindakan di mana penanggung jawab adalah bertanggung jawab muncul dalam kaitan dengan kepercayaan sumber daya kepadanya. Karenanya menggunakan (atau penyalahgunaan sumber daya (tidak dengan apa saja hanya keuangan) menjadi tindakan akuntansi adalah bertanggung jawab.

Barangkali, ada definisi lebih baik:

Akuntabilitas menjadikan tugas dari suatu kesatuan untuk menggunakan (dan mencegah penyalahgunaan) tentang sumber daya mempercayakannya dalam suatu cara efektif, hemat dan efisien, di dalam batasan-batasan dari moral dan kerangka sah undang-undang menyangkut masyarakat dan untuk menyediakan suatu akuntabilitas tentang tindakannya pada akunting tidaklah hanya para orang yang menyajikannya dengan sumber daya keuangannya tetapi ke kelompok di dalam masyarakat dan masyarakat sebebasnya

Dalam model akuntabilitas yang diusulkan oleh Gray et al suatu akunting (perorangan, perusahaan, otoritas lokal dan lain-lain) diberi sumber daya untuk mengatur di dalam batasan dan kondisi-kondisi tertentu dan sasaran hasil tertentu. Ini bisa diperoleh dari kontrak yang tertentu seperti halnya sosial mengontrak yaitu perundang-undangan yang menyediakan kebutuhan yang minimum, perundang-undangan dan moral/etika/budaya nilai-nilai menyangkut masyarakat di mana operasi organisasi dan yang mana itu saling berhubungan.

Akunting bukan sekedar tugas untuk memberi suatu rekening yaitu melaporkan pada pencapaian atau tidak untuk tugas-tugas ini tetapi juga untuk bertindak atau

menahan diri dari bertindak sebagai suatu cara tertentu. Paradigma akuntansi mainstream telah banyak digugat eksistensi dan kebenarannya. Oleh karena itu, usaha untuk membangun paradigma baru akuntansi yang lebih humanitarian, berwawasan sosial dan etis (*value bond*) harus menjadi agenda penting para ilmuwan. Dan usaha membangun keilmuan baru akuntansi sebagai counter terhadap akuntansi lama adalah dengan melakukan dekonstruksi. Sehingga keilmuan akuntansi tidak lagi bias kepentingan pengusaha (*stockholders*) dan merugikan kepentingan publik (*sosial*).

D. Kritik Model Akuntansi

Model akuntansi telah dikritisi oleh Parker (1991: 23-34) karena menirukan bentuk prinsip yang melekat, Gray et al membuktikan salah pernyataan tanpa bukti ini dengan menyatakan bahwa '*asumsi rakit utuh*' yaitu kegunaan dan keserakahan dan bunga maksimum berlawanan perilaku, tidaklah perlu di dalam model akuntansi. Model akuntansi tidak mengasumsikan filsafat reduksionis hanyalah pekerjaan untuk perbaikan kedua-duanya pengguna akuntansi dan akunting. Tidak perlu hanya memegang janji sebagai kerangka sosial perusahaan dan akuntansi lingkungan tetapi untuk perubahan akuntansi konvensional juga.

Roberts merinci hal positif aspek akuntansi ini sebagai berikut:

“... menjadi dipegang bertanggung jawab untuk servis tindakan seseorang untuk mempertajam perasaan diri seseorang dan tindakan seseorang. Praktek akuntansi memusat perhatian di dalam aliran yang mengakui adanya dan mengkonfirmasi diri dan fakta bahwa tindakan seseorang membedakan. Dan sebaliknya, dalam ketidakhadiran yang sedang memegang dapat dipertanggungjawabkan, ada suatu kemungkinan memperlemah dan memudar perasaan diri seseorang dan situasi (Roberts, J and Robert Scapens, 1985: 356).

Akuntabilitas telah menjadi pelayan (*stewardship*) (Parker, L.D., 1991: 23-34). Bagaimanapun, akuntansi berasumsi bahwa sebagai tambahan terhadap menyediakan suatu rekening menyangkut penggunaan dari sumber daya, informasi efek dari penggunaan (penurunan derajat lingkungan) yang harus dilaporkan. Begitu *stewardship* dapat dilihat untuk menjadi "*kasus akuntansi khusus dan sederhana*" (Gray and K. Maunders, 1991: 38).

Bagaimanapun *stewardship* nampak terlalu sederhana pada konsep perusahaan multinasional korporasi dan kesatuan lain yang mantap menggunakan sumber daya dan asset masyarakat. Begitu perusahaan laporan 1975 oleh ASSC menggambarkan dugaan '*akuntansi publik*' di mana suatu organisasi menggunakan sumber daya penting masyarakat, haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk penggunaan sumber daya itu semua, (apakah dihargai atau bukan). *Stewardship* kelihatan seperti hubungan lemah dari konsep *decision-usefulness* yang mana menekankan pemegang saham dan kreditur pada kerusakan dari yang lain..

Walaupun akuntansi tidak akan menghalangi *decision-usefulness* dalam pengertian bahwa keluaran informasi selama pemecatan tanggung jawab mungkin

bermanfaat dalam pembuatan keputusan, apakah penanggung jawab tidak berkelakuan bertanggung jawab dan jika menggantikan atau mengubahnya, hipotesis *decision-usefulness* ini sama sekali semuanya berbeda. *Decision-Usefulness* dalam suatu alat-alat demokrasi ekonomi liberal murni untuk menyediakan informasi yang memungkinkan penyedia dana kapitalis untuk mendapatkan lebih kaya. Walaupun ini dikira berlangsung di dalam ketentuan-ketentuan permainan, fakta menjadi ketentuan-ketentuan permainan jadilah lebih sering kemudian tidak yang ditangkap oleh sepasukan tentara kapitalis dalam profesi dan pemerintah yang mana dikira melindungi masyarakat yang menarik perhatian.

E. Pembatasan dan Permasalahan Model Akuntansi

Sebagai informasi tambahan yang berhubungan sesuai kontrak antara pesta, inti sari dari model akuntansi berasal dari peran bahwa masyarakat menganggap berasal dari kepada hubungan kontrak sosial.. Pada hakekatnya masyarakat ini atau dalam Islam (masyarakat dan Tuhan) menentukan tanggung jawab dan hak-hak untuk informasi.

Gray et al mengenali bahwa dua kategori kebenaran dan akuntansi berbeda yaitu tidak sah undang-undang dan sah undang-undang (moral atau kebenaran] dan akuntansi alami) dan bahwa hukum merebahkan diri tingkatan akuntansi yang minimum dan kebenaran. Bagaimanapun mereka mencatat bahwa hukum menetapkan tanggung jawab untuk tindakan tertentu (peluang sama) tidak menghasilkan suatu akuntansi padanan ke rekening dalam semua kasus. Begitu tanggung jawab hukum dan tindakan pada tanggung jawab tidak sama. Perbedaan kedua tanggung-jawab, mereka membantah, membawa suatu akuntansi moral pada rekening dan pemenuhan sukarela, berputus-asa meminta suatu peraturan wajib untuk meliputi laporan perusahaan sosial.

Penulis gagal untuk melihat logika dengan tegas bahwa suatu akuntansi moral pada tanggung-jawab yang ada ketika suatu tanggung jawab hukum untuk tindakan ada. Kontrak sosial dan seluruh fakta bahwa organisasi (ukuran penting) dan menggunakan sumber daya masyarakat penting berupa laporan perusahaan, ASSC 1975 perlu memberi kenaikan kepada suatu tanggung jawab moral untuk tindakan bahkan di ketidakhadiran perundang-undangan. Berikut pandangan baru:

"untuk dapat dipertanggungjawabkan secara morali dan spiritual yang menggembirakan pikiran pada tindakan.... Itu hanyalah ... pengaruh keadaan efek organisasi besar yang membuat gagasan untuk kebebasan memberi suatu tanggung jawab maka *bizarre*". (Gray, and C. Adams, 1996: 53).

Jika suatu pandangan kontrak sosial organisasi bisnis tidaklah diingatkan, organisasi mengikuti isyarat Friedman (1962), akan meminta dengan tegas mereka tidak punya tanggung jawab seperti pada akuntansi.

Bagaimanapun, dalam iklim *neo-pluralist*, *self-interested* dan penggunaan maksimum masyarakat kapitalis, di sana boleh jadi tidak ada pilihan lain dalam jangka pendek kecuali melalui undang-undang "*pemenuhan dengan laporan standard*."

F. Akuntansi dan Etika

Masalah lain dengan model akuntansi menjadi sifat alami moral/filsafat kebenaran dan bagaimana mereka ditentukan. Gray et al memberikan ciri kemutlakan dan akuntansi filosofis relatif. Bagaimanapun, di dalam masyarakat di mana nilai-nilai religius tidak menyebar keseluruh bagian industrinya, bahkan kemutlakan moral/religiusitas nilai-nilai yang menjadi kerabat (sikap pada arah homoseksualitas dan *pre-marital* jenis kelamin). Penulis setuju secara parsial pada kebenaran filosofis yang dapat dicapai pada perdebatan, persetujuan dan pendidikan. Sama sekali tidak semakin sedikit, sangat sukar untuk menjangkau persetujuan dan konsensus ketika bagian masyarakat besar mengambil sekali ketika nilai-nilai mesum universal (nilai-nilai sesat?) sebab moral. Ini menciptakan perselisihan paham dan tegangan dari konsensus (anti-abortionist melobi di AS). Lebih lanjut, persetujuan dan diskusi mungkin berakhir dalam penobatan dorongan etika kepada kerusakan *deontological* (bukan penganut kemutlakan) etika yang mana, pada pendapatku, akan mendorong kearah suatu etika relativist ilmu yang mungkin mendorong kepentingan diri. Di dalam masyarakat Islam, bagaimanapun, etika diperoleh dari syariah (hukum Islam) dan bukanlah tunduk kepada perubahan walaupun dorongan pertimbangan (rendah hati bukan kepentingan diri) boleh memerlukan pengasingan dari etika dalam situasi tertentu untuk menyelamatkan jiwa. Demikian dalam suatu masyarakat, moral/filsafat kebenaran adalah lebih mudah untuk menetapkan.

G. Islam, Syariah dan Kebutuhan akan Akuntansi syariah

Filsafat ontologi berasal dari masyarakat Islam. Sasaran dari masyarakat Islam adalah menjadi penetapan masyarakat yang adil:

" Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS Al-hadid, 57:25)

Tugas yang baik dalam pelarangan dan melarang kejahatan. (ukuran-ukuran kebaikan dan kejahatan dinyatakan di dalam Al Qur'an. filsafat hidup ini adalah suatu tes dan suatu pijakan batu kepada kehidupan yang kekal di alam baka. Politik, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan dan tiap-tiap usaha manusia harus menghubungkan prestasi kebahagiaan di alam baka dan tidak ada akuntansi perkecualian.

Pandangan Islam sungguh memandang dua dunia. Alam baka sama riil seperti dunia ini. Karena orang Islam, dunia ini mempunyai suatu kenyataan tetapi sementara, keberadaan tidaklah tanpa batas.

Allah adalah satu dan pencipta segalanya yang unik di dalam langit dan bumi. Ia Maha menopang, Maha murah hati. Ia tidak punya mitra dan tidak makan atau minum bergizi atau ciptaan.

Manusia dan wanita-wanita mempunyai suatu asal umum pada Adam dan Hawa begitu oleh karena itu tidak ada ras, kebangsaan, bahasa atau warna dan di sana tidak ada orang-orang terpilih atau ras baik orang Islam telah dihasilkan untuk umat manusia, mereka menjadi yang terbaik sebab mereka beriman dan melaksanakan kebenaran dan melarang salah. Secepat mereka stop membuat pekerjaan ini, mereka terjatuh dan digantikan dengan yang lain. Allah tidak bernama dan tidak memiliki sekutu.

Allah yang memberkati manusia dengan pengetahuan dan kebebasan untuk bertindak. Kebebasan untuk bertindak menyiratkan suatu kepercayaan atas manusia yang mana ia harus melepaskan. Setelah yang diciptakan manusia, Allah tidak meninggalkannya sendiri, ia mengirimkan pembukaan rahasia ilahi melalui para nabi untuk berbagai tempat dan waktu. Puncak dari pembukaan rahasia ini menjadikan Al Quran (tetapi Tuhan telah mengirim kitab injil lain sebelumnya yang (mana) adalah yang manapun hilang atau korupsi). Manusia (dan wanita-wanita!) dihadahi di (dalam) alam baka (dengan surga dan penglihatan ilahi) karena hidup mengikuti ajaran ilahi dan yang dihukum di dalam neraka untuk melawan perintah hanyalah dengan kemungkinan tobat dan pengampunan dosa di dalam hidup ini.

Manusia menjadi makhluk yang mulia. Semua ciptaan (manusia, binatang, mineral dan tumbuhan) adalah kedua-duanya suatu kepercayaan yang mana akan harus dibukukan seperti halnya sumber daya yang mana harus digunakan sesuai bimbingannya. Manusia dapat dipertanggungjawabkan ke Allah pada hari penghakiman dan untuk tujuan mereka diberi pengetahuan dan alasan (kedua-duanya dari sumber ilahi dan melalui perolehan diri).

Bagaimanapun syariah diperluas melalui suatu proses analogi, pertimbangan dan konsensus hak kekayaan, kepentingan publik, kebiasaan, anggapan kesinambungan, rata-rata ganjalan (kejahatan) dan pemikiran pribadi. Walaupun ini boleh mengakibatkan bermacam-macam pendapat, mengijinkan hukum untuk pertemuan kebutuhan berbagai masyarakat pada berbagai tempat dan waktu. Pendapat yang bermacam-macam, telah mengakibatkan sedikitnya empat madzhab jurisprudensi Islam. Bagaimanapun, perbedaan pendapat adalah dikira suatu kemurahan hati pada orang Islam (jika tidak akan terjadi suatu mayat hidup dunia). Orang Islam dapat dengan bebas merubah antara madzhab tanpa ketakutan menjadi *ex-communicated*.

Proses perluasan syariah mengalami kesuksesan sekitar seribu tahun. Dalam periode ini, hidup selalu dipandang holistik dengan agama, politik, masyarakat, keluarga, masyarakat dan lingkungan sampai politis kemerosotan tertentu (konversi dari kepemimpinan konsultatif ke raja, divisi Negara tunggal orang Islam ke dalam negara-negara, Invasi orang Mongol ke Negeri Islam) dan faktor sosial (dominasi madzhab hukum tertentu di atas orang yang lain pada umumnya didukung oleh penetapan politis) yang disebabkan suatu kebusukan dalam proses regenerative ini. Proses ini membusuk mencapai tingkat tertinggi setelah kolonisasi orang Islam oleh negara-negara barat dan separasi Islam sebagai akibat dari politik, hukum dan hidup sosial.

Kolonisasi mengakibatkan lembaga keuangan basis bunga (menempatkan bunga yang dilarang Islam), makhluk asing hukum bisnis dan praktek akuntansi dan liabilitas

terbatas pribadi pada undang-undang yang sedang diperkenalkan oleh negara Islam. Orang Islam yang memiliki hukum atrophied yang merosot melalui pembatasan yang berguna pada lapisan sosial dan ekonomi) yang tidak bisa menghadapi pada saat Kebangkitan Islam dalam *post-independent* negara Islam menuntut solusi Islam pada permasalahan mereka setelah melelahkan orang sosialis dan percobaan kapitalis yang hanya memperburuk permasalahan mereka.

Proses pendidikan yang religious didasarkan dalam civilisasi Islam telah digantikan oleh pengetahuan sekuler barat. Sekarang ada suatu proses Islamisasi pengetahuan untuk mendamaikan dan membangun kembali pengetahuan pada rahasia pembukaan dan alasan serta akuntansi juga salah satu dari pokok materi melibatkan.

Walaupun negara Islam bukanlah Islam dalam kaitan dengan historis, politis, alasan ekonomi, ada suatu *re-emergence* Islam atas peristiwa; pandangan sosial, politis dan ekonomi dalam negara Islam. Masa orang Islam, setelah eksperimen yang celaka dengan berbagai aliran (sosialisme, komunisme, kapitalisme, bathism dan lain-lain) yang percaya bahwa ia harus kembali ke akar Islam untuk memecahkan permasalahannya dan kebangkitan Islam menjadi hasil.

Sejak masyarakat Islam dikira mendasarkan hubungan bermasyarakat, kegiatan ekonomi dan akuntansi berdasar syariah, itu bersifat baik untuk mempertimbangkan yang umum dan terutama sasaran hasil ekonomi syariah sebagai tambahan terhadap mensurvei perintah yang spesifik berhubungan dengan akuntansi dan ekonomi. Bahkan jika perintah tidaklah spesifik atau memerinci cukup, kita bisa tiba pada akuntansi yang diperlukan oleh Islam berikut metoda dibahas pada bagian sebelumnya dan mempunyai sasaran hasil syariah dalam pikiran.

H. Sasaran Syariah

Tujuan umum dari syariah menurut ahli filsafat dan pemikir yang terkenal Imam Al-Ghazzali (1058 - 1111) adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dari orang-orang, yang mana berada dalam perlindungan iman mereka, hidup mereka, akal mereka, anak cucu mereka dan kekayaan mereka.

Menurut pendapat yang lain, Ibn Al Qayim al-Jawziyyah (Chapra, 1992). Dasar syariah adalah kesejahteraan dan kebijaksanaan menyangkut orang-orang di dalam dunia ini seperti halnya Alam baka yang berada di dalam keadilan lengkap, kemurahan hati, kesejahteraan dan kebijaksanaan. Apapun yang meninggalkan keadilan pada tekanan, kemurahan hati pada kekerasan, kesejahteraan pada kesengsaraan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan, menjauhi syariah.

Kita dapat begitu melihat promosi keadilan itu, kesejahteraan (kedua-duanya sosial dan ekonomi) dan hak milik melindungi harus pada sasaran ekonomi Islam dan begitu juga akuntansi. Ini bukanlah tidak sama dengan pendapat Arrington'S (1990) (Arrington, E. 1990, 1-16) tentang proposal yang menggunakan kesetiakawanan dibanding obyektifitas sebagai dasar pengetahuan akuntansi.

I. Sasaran Ekonomi Syariah:

Dalam rangka merinci bagaimana keadilan, kesetiakawanan dan kesejahteraan diharapkan untuk terpenuhi, sasaran ekonomi syariah dan syarat sah akan menjadi pertimbangan berikutnya. Sasaran ini tidaklah didasarkan pada hanya perilaku Islam yang filosofis oleh Ahli filsafat dan ahli hukum tetapi pada Al Qur'an dan Sunnah. Dalam rangka menyelamatkan waktu yang tidak akan mengacu pada sumber.

J. Peredaran Kekayaan:

Kekayaan tidak harus diedarkan secara luas dan memegang atau memusatkan pada beberapa:

Untuk mempromosikan ini, zakat (pajak religius 2.5%) adalah suatu kewajiban religius pada semua orang Islam dan berproses dibagi-bagikan untuk suatu kelas orang-orang dilukiskan dalam Al Qur'an (lemah/miskin, kaum fakir miskin, musafir, berpergian dll.). Zakat menjadi pembagian kembali mekanisme; suatu jaminan sosial yang menjaring yang terkait dengan ketidakmampuan untuk bekerja, dilemahkan, tidak pada sukarelawan yang menganggur, yatim piatu, dan lain lain. Penilaian dibuat oleh status Islam dan fokus utama akuntansi syariah sebagai tambahan, membelanjakan pada famili dan keluarga didukung, derma kepada kaum fakir miskin mendukung sebagai tambahan terhadap zakat (infaq dan sadaqah)

Bunga merupakan cara yang benar pada akumulasi kekayaan sedang menghindarkan resiko yang mengempung peminjam secara total yang dilarang dalam Islam. Ini telah menimbulkan perbankan Islam yang mana didasarkan pada rugi-laba usaha yang berbagi sebagai ganti tingkat tarip yang ditentukan atas jumlah dipinjam dalam bunga konvensional yang didasarkan peminjaman, yang secara total mengabaikan hasil dari spekulasi di mana uang digunakan. Suatu model hidup moderat didukung, kemewahan tidak disetujui seperti halnya kemiskinan, laki-laki (bukan wanita-wanita) tidak bisa memakai emas dan sutera. Orang Islam tidak bisa menggunakan tembikar atau plat perak dan emas.

Hukum waris: kaleng akan pergi hanya 1/3 hak milik. Bagian penerima uang dan sungguh terperinci. Ini memastikan distribusi kekayaan.

K. Pencapaian Pencegahan dan Kesetiakawanan Perselisihan:

Halal Berdagang: Investasi hanya dapat dikerjakan dalam aktivitas yang tidaklah dilarang dalam Islam (larangan meliputi perjudian, alkohol, apapun dan pornografi yang mana berbahaya pada masyarakat). Pertanian Ketenaga-kerjaan didukung seperti halnya martabat tenaga kerja, dan anjuran permohonan pembayaran gaji yang cepat.

L. Transaksi yang Terlarang dan Kontrak:

Semua kontrak harus jelas dan manapun kontrak tidak-pasti (gharar) membeli ikan di dalam kolam tidak sah. Ini akan menghindari kerusakan, konflik dan perselisihan

Minjamkan transaksi dan transaksi lain yang mempunyai masa depan kewajiban persekutuan, usaha patungan harus direkam dan disaksikan. Transaksi bersifat untung-untungan terlarang. Hak kekayaan: Harga penjualan adil ditentukan di dalam pasar kompetitif, tidak ada pemberian label curang atau uraian palsu, pasar bebas, dan tidak ada monopoli. Kontrak asuransi konvensional berdasar pada ketidak-pastian, spekulasi dan mempunyai suatu unsur perjudian dilarang dan digantikan oleh takaful, suatu rencana berdasar pada *co-operative* yang menyelamatkan, sebagian yang mana memasuki suatu kolam klaim umum, jika suatu ketidakpastian muncul. Kepemilikan pribadi dan publik mempunyai peran mereka dan privatisasi tanah milik negara penting tidak disetujui negara Islam yang juga membuat *mistaking* dalam privatisasi segalanya dan apapun.

M. Kebutuhan Akuntansi Syariah

Dari di atas diskusi, orang bisa menyimpulkan Islam mempunyai banyak nilai-nilai universal secara umum dengan barat. Sebab Islam percaya kitab injil yang lebih awal dalam format aslinya dari Tuhan yang sama, ini tidaklah mengejutkan. Bagaimanapun, larangan penetapan dan bunga yang spesifik dari zakat pajak, dan status hukum pada perjudian, kontrak tidak-pasti dan lain lain yang mana dilarangan dan bukan desakan moral, menyiratkan bahwa sasaran akuntansi syariah adalah berbeda dari konvensional dan genap sampai taraf tertentu akuntansi lingkungan dan sosial. Begitu ada suatu kebutuhan untuk akuntansi syariah berdasar pada pendapat berikut:

- a. Akuntansi adalah sebuah konstruksi sosial. Akuntansi konvensional telah mengembangkan menurut kebutuhan dari masyarakat barat yang kapitalistik dan hanya dapat dibenarkan di dalam suatu demokrasi ekonomi liberal murni. Dasarnya asumsi bunga dan kegunaan maksimum dan maksimalisasi kekayaan. Masyarakat Islam Masyarakat hendaknya berbeda dari masyarakat barat, sebab didasarkan pada bimbingan Ketuhanan dan syariah dengan suatu pandangan berbeda atas hidup dan motivasi berbeda yaitu untuk menyenangkan Allah dengan membuat apa yang ia memerintahkan dan dari menahan diri dari apa yang ia melarang. Allah tidaklah menyenangkan dengan *egois profit-maximisers*
- b. Kekayaan maksimalisasi tidak mendorong kearah kesejahteraan sosial ketika digambarkan oleh Islam. Begitu akuntansi syariah harus mempunyai suatu sasaran berbeda. Kesejahteraan sosial dalam Islam berarti penghindaran kerjasama perselisihan, kesetiakawanan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang patut bersama dengan usaha rohani kesejahteraan sosial

- c. Akuntansi konvensional memimpin ke arah pembinasaan ekologis global dan akhirnya pembinasaan manusia sebab pola teladan konsumsinya tidaklah bisa menopang. Islam mempunyai larangan spesifik atas kekejaman ke binatang dan tumbuhan hidup, konservasi sumber daya seperti air. Begitu suatu sistem yang mendorong barang sisa dan pembinasaan tidak bisa diikuti.
- d. Akuntansi barat adalah suatu sistem informasi yang mana berdampak pada perilaku manusia memimpin ke arah konsentrasi kekayaan dan kuasa, suatu neo masyarakat keadaan jamak dan perbedaan distribusi kekayaan dan pendapatan yang luas mendorong ke arah suatu masyarakat yang tidak stabil. Dimanapun akuntansi syariah mestinya tidak mendorong kearah perilaku seperti itu yang mana seluruh lawan yang tepat dari syariah.

Sistem ekonomi Islam selagi belum secara penuh menerapkan, sedang mulai untuk yang disetujui dengan penetapan institusi bank Islam dan zakat (*poor-due*). Pelopor institusi ini banyak kesempatan operasi di bawah hukum barat, pasar kapitalistik dan akuntansi Anglo-American. Karenanya, bersama-sama, dengan kondisi-kondisi di dalam negara berkembang lain, ada suatu tidak sepadan (Hove 1990) antara tujuan dari sistem dan standard serta konsep akuntansi yang diimport. Ada suatu kebutuhan oleh karena itu untuk kembangkan suatu sistem akuntansi alternatif yang mana mempengaruhi tindakan dan perilaku memungkinkan pemenuhan dari sasaran masyarakat itu

N. Sasaran dan Kerangka Akuntansi Syariah

Ketika penulis berkata lebih awal, kerangka akuntansi yang paling logis yang di atasnya teori akuntansi syariah dapat dibangun. Dengan penuh harapan tanggung-jawab organisasi (yang mana suatu subset tanggung-jawab oang Islam pada Allah) dapat membangun kembali masyarakat Islam dengan mudah dibanding masyarakat barat, kecuali jika negara-negara Islam mengikuti negara-negara yang barat ke dalam lubang gangguan sosial dan penurunanderajat lingkungan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah kamu enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan". (QS Al Baqarah 2: 282)

Walaupun, ayat di atas kelihatannya mengacu pada penulisan perjanjian hutang, itu tidak akan terlalu dibuat-buat untuk meluaskannya ke akuntansi terutama karena pendapat Littleton (1966: 12) telah menyebutkan itu di antara yang terdahulu yang lain tentang akuntansi modern, penulisan dan kredit adalah dua prasyarat penting untuk kemunculan tata buku sistematis.

Kita dapat meringkas bahwa sasaran Akuntansi syariah adalah untuk menyediakan informasi ke masyarakat tentang pelepasan tugas (pemecatan) dari kepercayaan accountant's ke Allah dan masyarakat dalam urutan menetapkan kesetiakawanan dan keadilan antar anggota masyarakat yang mana meliputi lingkungan dan menghindari perselisihan antar anggota melalui transparansi dari operasi organisasi. Informasi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi barang sisa dan pembusukan lingkungan, mempromosikan dan memastikan hanya Islam mengizinkan kegiatan ekonomi untuk mencapai keadilan *socio-economic* dilaksanakan dan menopang dalam suatu distribusi kekayaan yang benar di antara bagian masyarakat.

O. Implikasi Teori dan Praktek Akuntansi Syariah:

Jika kita mengadopsi sasaran di atas, penghindaran perselisihan dan keadilan *socio-economic* (kesejahteraan publik) dan tanggung-jawab sebagai kerangka akuntansi syariah, ada implikasi serius untuk prinsip-prinsip akunting, konvensi, konsep (Adnan, and Gaffikin, 1997: 1820) untuk suatu tinjauan ulang mengenai literatur pada perspektif Islam mengenai konvensi dan konsep akuntansi), penilaian dan pengukuran (Gambling dan Karim, 1991) dan praktek pelaporan (Baydoun dan Willett, 1994).

Konvensi konservatisme dan biaya sekarang muncul dari kebutuhan pemilik bank dan pemegang saham. Bagaimanapun konsep ini bisa bertentangan dengan gagasan untuk keadilan dan kewajaran untuk penyerahan hak milik yang benar antar stakeholders berbeda dan anggota masyarakat yang tidak menguntungkan ketika zakat berdasar pada suatu penilaian nilai sejarah akan menghasilkan uang masuk yang lebih rendah dan sebagai konsekwensi menurunkan pembayaran transfer kepada penerima uang pada waktu inflasi dan biaya-biaya peningkatan. Gambling dan Karim sebagai contoh mendukung penggunaan nilai sekarang untuk kewajiban dan asset (akuntansi secara terus-menerus).

Laporan keuangan akuntansi boleh juga perlu diubah atau digantikan. Baydoun dan Willett, sebagai contoh menyatakan bahwa laporan utama harus suatu nilai tambah laporan sebagai lawan perkiraan rugi-laba, dalam kaitan dengan distribusi memusatkan yang mana lebih sejalan dengan penekanan Islam pada tugas ke rekening kepada masyarakat. Mereka memberikan opini lebih lanjut bahwa nilai tambah laporan adalah tempat suatu penekanan lebih besar atas *co-operative* kegiatan ekonomi alami dan lebih sedikit pada aspek yang kompetitif. Penekanan itu merupakan bagian dari berbagai kelompok dibanding pemilik dari perusahaan benar begitu juga dengan perkiraan rugi-laba. Walaupun ia tidak mengusulkan suatu neraca dan perkiraan rugi-laba nilai sekarang, mereka mengusulkan nilai-nilai sekarang dalam catatan kaki dengan ungkapan data pelengkap.

Ada juga suatu kebutuhan untuk memperpanjang pelaporan dan aktivitas, yang dibukukan oleh organisasi besar sekali dan besar yang mana melahap lebih sumber daya dibanding negara! Ini perlu digarisbawahi di dalam laporan perusahaan. Di bawah kondisi-kondisi ini, "*hal luar*" penting yang dijadikan seperti aktivitas bisnis

mempengaruhi kelompok lain di dalam masyarakat dan lingkungan yang tidak manusiawi. Begitu hal luar ini harus dibukukan. Karenanya akuntansi harus didasarkan pada "akuntansi publik" karena semua sumber daya yang dimanfaatkan oleh organisasi itu. Tidak hanya kepada pemilik tetapi ke masyarakat secara keseluruhan. Informasi kualitatif (non keuangan) yang harus meliputi berpotensi berdasar fakta dan bisa audit, tak peduli bagaimana dengan sembarangan menghargai, dibanding pernyataan dan mengharapkan masa depan dan pengintegrasian tanggung-jawab sosial dan lingkungan ke dalam badan utama sangat penting, bahkan ketika informasi adalah hal negatif harus dimasukkan.

Disamping itu juga sering kali akuntansi syariah dikatakan sebagai metafora amanah. Amanah menjadi sesuatu yang memunculkan implikasi-implikasi luas bagi persepsi mengenai cara melakukan bisnis dan memproduksi produk-produk perbankan, kehadiran watak altruistik dan egoistik dalam bisnis dan produk, serta persepsi dalam memperlakukan standar akuntansi, dan situasi-situasi lain yang membawa praktik akuntansi menuju praktik yang dikondisikan.

Persepsi individu-individu berkenaan dengan organisasi, baik organisasi bisnis maupun social. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa individu pada umumnya memetaforakan organisasi, sebagai amanah. Bagian lain bab ini mengidentifikasi proses pencarian tujuan real organisasi (organisasi sosial maupun bisnis) yang telah dimetaforakan sebagai amanah. Terbukti berdasarkan pandangan normal, bahwa tujuan utama organisasi adalah penyampaian rahmat bagi keseluruhan alam (rohmatan lil 'alamin), dan tujuan ini bisa diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran operasional yang mungkin kontekstual tergantung pada jenis organisasinya dan situasi-situasi lainnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam bagian-bagian akhir bab ini dikemukakan, perlu menggunakan pedoman yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan yang adil dari yang tidak adil; itulah etika. Berkaitan dengan itu, Triyuwono mengajukan syari'ah sebagai etika.

Hubungan yang kuat antara iman dan pengetahuan (dan selanjutnya tindakan) yang dipercaya, dipahami dan diimplementasikan oleh diri yang terlibat dalam lembaga tersebut. Iman dianggap sebagai inti paling dasar dari setiap muslim dan yang menggemakan nilai-nilai tertentu dan mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan iman ini, diri mempertimbangkan bahwa pengetahuan agama, yang utamanya terdiri atas Qur'an dan Sunnah, sangat penting, di samping pengetahuan tentang sains, yang membimbing implementasi zakat. Sebagai konsekuensinya, konsep manajemen amanah mengalir dari interpretasi terhadap al-Qur'an dan pemikiran keagamaan lainnya, dan begitu pula praktik akuntansinya.

Amanah dalam konteks praktik akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat dan Tuhan. Bentuk tanggung jawab untuk tiga kelompok pertama bersifat formal, yakni dalam arti sempit menerbitkan laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang sudah ada sebagai norma-norma. Tanggung jawab kepada Tuhan berarti bahwa pemegang

amanah, dalam mempersiapkan dan menerbitkan laporan keuangan, secara etis (moral) harus sesuai dengan norma-norma tersebut.

P. Kesimpulan

Kita dapat lihat akuntansi itu sedang datang lingkaran penuh. Pada permulaan, akuntansi terintegrasi ke dalam sosial dan hidup politis sampai menjadi sedikit yang dipusatkan dalam daerah yang ekonomi dengan pertumbuhan perusahaan besar dan kekuasaan ekonomi bermanfaat. Bagaimanapun, dalam kaitan dengan efek yang kurang baik pandangan dunia yang sempit seperti itu kepada sosial dan lingkungan alami, di sana tengah meningkatkan meminta suatu akuntansi yang lebih *holistic*, sekalipun hanya suatu versi lebih canggih waktu ini. Akuntansi syariah sebagai tambahan terhadap pertemuan keistimewaan budaya dan religius sendiri dari suatu masyarakat Islam dapat juga melihat menjadi suatu jawaban bagi panggilan *holistic* ini.

Begitu penulis melihat akuntansi terus meningkat meluaskan ruang lingkupnya kedua-duanya mengenai hal-hal pembukuan (tidak hanya peristiwa ekonomi), unit pengukuran (patahan ke luar dari konsep pengukuran moneter) kepada suatu peningkatan jumlah para pemakai kedua-duanya manusia cerdas tetapi penciptaan (binatang dan lingkungan fisik). Sungguh sial, westernisasi dan globalisasi menyangkut dunia Islam yang menjadikan penarikan negara Islam dalam jangka pendek ke arah suatu lebih akuntansi Anglo-American dalam rangka harmonisasi dengan standard akuntansi internasional yang global. Ini merupakan suatu pendukung *neo-pluralisme* dunia di mana berbagai kelompok kuasa yang mendominasi pada periode akan menarik akuntansi ke dalam genggamannya dan akan menggunakannya untuk melayani bunga (perusahaan multinasional dengan segera, lembaga investor dan positivist akademis sedang menikmati pesta mereka), pada zaman lain dan kelompok lain boleh memperoleh kuasa (perserikatan, kelompok konsumen, *greenies* dll.) dan akan menggerakkan akuntansi kepada bunga, sampai mereka mengabur. Bagaimanapun, jika yang pengertian baik berlaku dan orang masyarakat Islam tidak membatalkan warisan Islam mereka, akuntansi syariah akan berjaya, Insya Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. and Michael Gaffikin. 1997 "The Shari'ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices", *Proceedings of International Conference I on Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective*, Sydney Australia, 18-20 February 1997
- American Accounting Association. 1977 , Committee on Concepts and Standards for External Financial Reports, *Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance*
- Arrington, E. 1990, "Intellectual Tyranny and the Public Interest: The Quest for the Grail of and the Quality of Life", *Journal of Public Interest Accounting*, Vol 3.
- Baydoun, N. and R. Willett. 1994, "Islamic Accounting Theory", Paper presented at the *AAANZ Annual Conference*, 3-6 July 1994, Wollongong, Australia.
- Chapra, U.M. 1992, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester (UK): The Islamic Foundation.
- Chua, W.F .1986, "Radical Developments in Accounting Theory", *The Accounting Review* , Vol LX1, No. 4, October 1986.
- Cooper, David J. and Michael J. Sherer. 1984, "The value of Corporate Accounting Reports: Arguments for a Political Economy of Accounting", *Accounting, Organisations and Society* , Vol. 9, No. 3/ 4.
- Fazlurrahman, 2000, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Primayasa.
- Friedman, M. 1962. *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press., Chicago.
- Gambling, T. and R. A.A. Karim. 1991, *Business and Accounting Ethics in Islam*, London: Mansell.
- Gray, R., D. Gray and C.Adams. 1996, *Accounting and Accountability: Corporate Social and Environmental Reporting in a changing world* , London:Hermel Hempstead: Prentice Hall.
- Gray, R., D. Gray and K. Maunders .1991, "Accountability, Corporate Social Reporting and the External Social Audit", in C.R. Lehman (ed.) *Advances in Public Sector Accounting*, Vol 4.
- Greenwood, E. 1957, "Attributes of a profession", *Social Work*, Vol. 2 No. 3.

- Hove, Mfandaidza R. 1986, "Accounting Practices in Developing Countries: Colonialism's Legacy of Inappropriate Technologies", *International Journal of Accounting*, Vol 22.
- Kamali, M.H. 1989, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Petaling Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications.
- Laughlin, R.C. and A.G. Puxty, 1981, "Decision-Usefulness Orientation, Wrong Cart, Wrong Horse", *British Accounting Review*, Vol 13. No.1 , Spring 1981.
- Littleton. 1966. *Accounting Evolution to 1900*, reprinted by Russell and Russell: NY.
- Parker, L.D. 1991, "External Social Accountability: Adventures in a maleficent world", *Advances in Public Interest Accounting*, Vol 4.
- Roberts, J and Robert Scapens, 1985, "Accounting Sitems and Sitems of Accountability- Understanding Accounting practices in their organisational contexts ", *Accounting, Organisations and Society* , Vol. 10, No. 4.
- Tinker T., B. Merino and M.Neimark. 1982." The normative origins of positive theory", *Accounting, Organisations and Society*, Vol 7, No. 2.